

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud, 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika.
- , 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Hamzah, Andi, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2017. *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan, dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuffal, H. M. Alam, 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Kusnadi, Didi, 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Mulyadi, Lili, 1996. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang, 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amerta Buku.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2015. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Salam, Moch Faisal, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Samosir, Djisman, 2017. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Siahaan, Monang, 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo.
- Soesilo, R, 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politea.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd Asis, dan Amir Ilyas, 2020. *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana.
- Sugianto, 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Suraman dan H. Phillips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra, 2001. Bantuan Hukum “hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara”, Jakarta: PT Elex Media Komputtindo

Yuwono, Soesilo, 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (sistem dan prosedur), Bandung: Alumni.

Terbitan Pemerintah, Lembaga, dan Organisasi

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Karya Ilmiah

Abdullah, Junaidi S. 2015. Kajian Pasal 56 KUHAP tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa, *Lex Crimen*. Vol. 4 No. 7.

- Bawono, Bambang Tri. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*. Vol. 26 No. 2
- Fikriyah, Alifatul. 2017. Implikasi Hukum Dan Upaya Preventif Terhadap Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Verstek*. Vol. 6 No. 1.
- Hardianto. 2020. Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 5 No. 2.
- Lasmadi, Sahuri. 2014. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum, *Inovatif*. Vol. 7 No. 2.
- Lumempouw, Bilryan. 2013. Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Crimen*. Vol. 2 No. 3.
- Rahmi Syukri. 2017. Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*. Vol. 01 No. 02.
- Rada, Arifin. 2014. Esensi Keberadaan Advokat menurut Hukum Islam, *Ahkam*. Vol. 14 No. 1.
- Riyanto, Tiar Adi. 2021. Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Lex Renaissance*. Vol. 6 No. 3.
- Rozi, Mumuh. M. 2015. Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 7 No. 1.

- Shiddiq, Farhan Ridhwan. 2018. Perlindungan Hukum atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasehat Hukum dalam Memenuhi Hak Hak Terdakwa, Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2.
- Siallagan, Haposan. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Sosiohumaniora. Vol. 18 No. 2.
- Surin, Muhammad Musa. 2012. Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai Kewajiban Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polresta Pontianak), Nestor: Tanjungpura Journal of Law. Vol. 2 No. 2.
- Suslianto. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 KUHAP Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Al-Himayah. Vol. 3 No. 1.
- Yasim, Rahim. 2018. Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Di Kepolisian Daerah Maluku Utara (Studi Kasus Periode Tahun 2015—2017), Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scripta. Vol. 4 No. 2.

Internet

- ICJR, 2018, *Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*, dalam <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.